

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek penelitian dari penelitian ini adalah pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di 111<sup>0</sup>0 Bujur Timur - 114<sup>0</sup>4 Bujur Timur dan 7<sup>0</sup> 12 Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km<sup>2</sup> yang meliputi dua bagian utama yaitu daratan Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70% atau 42.541 km<sup>2</sup> sementara luas Kepulauan Madura memiliki 11,30% atau sebesar 5.422 km<sup>2</sup> . Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan Kota Surabaya sebagai Ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kab. Blitar, dan Kab. Nganjuk. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Mojokerto, dan Kab. Pacitan. Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, dan Kab. Banyuwangi. Bakorwil IV Pamekasan, meliputi Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep. (<http://jatimprov.go.id/>)

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Alasan dipilihnya Provinsi Jawa Timur, data dari hasil pemeriksaan LKPD dalam hal ini meskipun Jawa Timur memperoleh hasil WTP oleh BPK namun beberapa wilayahnya BPK masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Meskipun begitu dapat dilihat juga bahwa proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2014-2019, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat rata-rata 9,62% per tahun, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,75–7,59 persen per tahun, inflasi rata-rata 4,5–6 % per tahun. Dengan meningkatnya perekonomian yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi, maka potensi obyek pajak dan retribusi akan meningkat. Selain itu juga, Pada tahun 2019 total realisasi pendapatan daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 33,5 triliun rupiah, dari pendapatan tersebut komponen terbesar adalah dari Penerimaan Asli Daerah (PAD) sejumlah 19,3 triliun rupiah. Sedangkan realisasi belanja tahun 2019 adalah 34,0 triliun rupiah. Realisasi pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 berjumlah 96,2 triliun rupiah, sedangkan realisasi belanja sebesar 109,8 triliun rupiah. Dari keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, realisasi pendapatan paling besar dicapai oleh pemerintah Kota Batu dengan pendapatan sebesar 8,7 triliun rupiah. Realisasi belanja paling besar juga dicapai oleh pemerintah Kota Batu dengan realisasi belanja sebesar 9,9 triliun rupiah. Dapat disimpulkan meskipun mengalami kenaikan pada realisasi pendapatan dan meraih opini WTP, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur harus lebih meningkatkan sumber kekayaan yaitu pada sektor pendapatan asli daerah karena masih banyak provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan pendapatan apalagi untuk ukuran entitas di pulau Jawa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur harus mengoptimalkan efisiensi kinerjanya agar tercapainya kinerja keuangan dengan hasil yang lebih baik serta tercapainya kesejahteraan publik.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Di era demokrasi yang sangat berkembang saat ini, masyarakat Indonesia dapat secara bebas berpendapat dan mengontrol kebijakan pemerintah. Kebebasan tersebut merupakan salah satu faktor pemicu masyarakat dalam menuntut pemerintah agar dapat bekerja dengan semestinya. Salah satu upaya pemerintah menghadapi berbagai tuntutan publik adalah dengan menjalankan visi dan misi pemerintahannya serta berkomitmen yang tinggi guna untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara yaitu dengan adanya otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara mandiri dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki dan penggunaannya harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Undang-Undang No.32 tahun 2014 menjadi landasan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dalam hakikatnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pembangunan yang menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 menjelaskan bahwa, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut Halim & Hanafi (2016), Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Nugroho & Prasetyo (2018), kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai

akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal penting bagi pemerintah daerah dan pihak yang membutuhkan. Pengukuran kinerja keuangan bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah, yaitu salah satunya adalah menggunakan rasio efisiensi, dimana tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Menurut, Mardiasmo (2017), efisiensi adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Indikator efisiensi menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*Outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Efisiensi keuangan daerah penting untuk dinilai karena untuk mengetahui arah perkembangan dimensi keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena yang ada menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan, pada Tahun Anggaran 2019 BPS Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.526.142.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.030.132.137,- (93,82%). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan maupun sasaran strategis dapat dikatakan BPS Provinsi Jawa Timur telah melakukan efisiensi pada kinerja keuangannya. Hal yang sama terjadi pada pelaksanaan seluruh program dan kegiatan BPS. Masing-masing program dan kegiatan tersebut memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggaran. Meskipun telah masuk kategori efisien, namun terdapat faktor penghambat dengan metode pengukuran efisiensi kinerja keuangan diantaranya adalah efisiensi penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran yang realisasi anggarannya terdapat deviasi serta efisiensi realisasi anggaran untuk mutu sarana dan prasarana SMA serta SMK yang juga terdapat deviasi. Karena rasio efisiensi dapat dikatakan efisien jika persentase kinerja keuangan berada dibawah 100%. Berikut merupakan tabel perbandingan tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah se-provinsi di Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2019:

**Table 1.1**  
**Perbandingan Rasio Efisiensi Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2018 dan**  
**2019**

No	Provinsi	Tahun	
		2018	2019
1	Provinsi Aceh	85,30%	100,22%
2	Provinsi Sumatera Utara	98,90%	102,76%
3	Provinsi Sumatera Barat	99,60%	102,52%
4	Provinsi Riau	99,89%	99,85%
5	Provinsi Jambi	95,15%	105,45%
6	Provinsi Sumatera Selatan	86,87%	103,63%
7	Provinsi Bengkulu	104,48%	106,28%
8	Provinsi Lampung	106,20%	97,13%
9	Provinsi DKI Jakarta	100,28%	104,23%
10	Provinsi Jawa Barat	98,27%	99,43%
11	Provinsi Jawa Tengah	99,09%	101,13%
12	Provinsi DI Yogyakarta	97,30%	97,29%
13	Provinsi Jawa Timur	96,00%	101,53%
14	Provinsi Kalimantan Barat	94,37%	95,58%
15	Provinsi Kalimantan Tengah	97,21%	101,48%
16	Provinsi Kalimantan Selatan	92,26%	103,68%
17	Provinsi Kalimantan Timur	87,59%	96,71%
18	Provinsi Sulawesi Utara	96,73%	105,49%
19	Provinsi Sulawesi Tengah	93,48%	99,29%
20	Provinsi Sulawesi Selatan	100,76%	99,14%
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	94,74%	99,09%
22	Provinsi Bali	95,83%	98,09%
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	106,04%	99,05%
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	101,38%	98,56%
25	Provinsi Maluku	99,82%	95,66%
26	Provinsi Papua	97,75%	88,07%
27	Provinsi Maluku Utara	97,98%	98,86%
28	Provinsi Banten	96,83%	101,10%
29	Provinsi Bangka Belitung	92,47%	103,04%
30	Provinsi Gorontalo	101,55%	99,92%
31	Provinsi Kepulauan Riau	97,71%	92,75%
32	Provinsi Papua Barat	95,04%	81,74%
33	Provinsi Sulawesi Barat	96,02%	98,58%
34	Provinsi Kalimantan Utara	97,20%	92,58%
<b>Rata-Rata</b>		97,06%	99,12%

Sumber: DJPK (diolah 2021)

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas menunjukkan nilai rata-rata persentase rasio efisiensi se-provinsi di Indonesia tahun 2018 adalah sebesar 97,06% sudah efisien dan tahun 2019 sebesar 99,12%. Hampir seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu yang sebelumnya sudah efisien menjadi tidak efisien kinerja keuangannya, hanya terdapat 10 provinsi yang mengalami penurunan yang sebelumnya tidak efisien menjadi efisien serta nilai rata-rata persentase yang sudah efisien namun menurun yaitu Riau, Lampung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Gorontalo, Papua Barat, Kalimantan Utara dan sisanya 24 provinsi mengalami peningkatan ketidakefisienan kinerja keuangannya. Pada tahun 2018 terdapat 7 Provinsi dengan rasio diatas rata-rata dan 14 provinsi di tahun 2019 yang memiliki rasio diatas rata-rata. Fenomena yang terkait kinerja keuangan pemerintah pada seluruh Provinsi di Indonesia sudah efisien namun di beberapa provinsi masih terdapat ketidakefisienan terhadap kinerja keuangannya, karena rasio efisiensi dapat dikatakan efisien jika persentase kinerja keuangan berada dibawah 100%.

Ukuran pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar ukuran pemerintah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah kecil maka dalam pelaksanaan operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (Aziz, 2016).

Ukuran pemerintah dapat diproksikan dengan total aset yang dimiliki daerah tersebut. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakatnya harus didukung oleh aset yang memadai. Pengelolaan aset daerah yang baik, akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan operasional (Novia & Kartim, 2019). Dalam hal ini, ukuran pemerintah menjadi tolak ukur dalam menentukan besar kecilnya pemerintah daerah. Ukuran adalah skala atau nominal yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu obyek. Semakin besar nilai total aset maka semakin besar ukuran pemerintah. Semakin besar ukuran pemerintah maka

masalah yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah akan semakin kompleks dan berisiko penyalahgunaan yang besar (Masdiantini & Erawati, 2016).

Berdasarkan penelitian sebelumnya diperoleh hasil Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Masdiantini & Erawati (2016). Hal yang sama dikemukakan oleh penelitian Aziz (2016) dan I. P. Sari et al. (2016) bahwa Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Prasetyo (2018) dan Novia & Kartim (2019) yang menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana perimbangan adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah agar tidak ada suatu daerah yang tertinggal, serta meningkatkan kapasitas daerah (Novia & Kartim, 2019). Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembagian dana perimbangan yang tidak merata akan berdampak terhadap ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga membuat pemerintah daerah tidak mandiri dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah pada daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Aziz (2016) dan I. P. Sari et al. (2016) diperoleh hasil Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh (Novia & Kartim, 2019) diperoleh hasil Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil yang sama dikemukakan oleh

Masdiantini & Erawati (2016) yang menunjukkan hasil Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Temuan audit spi yaitu berupa hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan pelanggaran atas ketidakpatuhan atas ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Susanti et al., 2018).

Auditor independen yang menilai kualitas LKPD di dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah BPK. Salah satu temuan audit BPK dari hasil audit BPK terhadap LKPD yaitu mengungkapkan kelemahan spi. Sistem pemerintahan di Indonesia telah bergeser dari sentralistik menjadi desentralistik. Pemerintah daerah di satu sisi memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola daerahnya (termasuk pengelolaan keuangan daerah), namun di sisi lain, luasnya kewenangan yang dimiliki beserta besarnya dana yang dikelola dapat mengakibatkan resiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sehingga mengindikasikan tingginya kelemahan spi di dalam pemerintah daerah. Peran spi adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Upaya pemerintah daerah untuk memperoleh opini yang baik melalui upaya menekan seminimal mungkin tingkat kelemahan spi sebagai bentuk manifestasi *agency cost* antara pemerintah dengan *stakeholders* (Masdiantini & Erawati, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Susanti et al. (2018), dan Ditasari & Sudrajat (2020) diperoleh hasil Temuan Audit SPI berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Masdiantini & Erawati (2016), dan Dasmara et al. (2020) diperoleh hasil Temuan Audit SPI tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan, dan**

## **Temuan Audit Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2017-2019).”**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara mandiri dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki dan penggunaannya harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Undang-Undang No.32 tahun 2014 menjadi landasan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dalam hakikatnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pembangunan yang menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal penting bagi pemerintah daerah dan pihak yang membutuhkan. Pengukuran kinerja keuangan bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah, yaitu salah satunya adalah menggunakan rasio efisiensi, dimana tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan dan terdapat hasil yang inkonsisten dalam penelitian terdahulu, maka peneliti akan menguji kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan ukuran pemerintah, dana perimbangan, temuan audit atas spi.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan, Temuan Audit SPI, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan, Temuan Audit SPI berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?

3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
  - a. Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?
  - b. Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?
  - c. Temuan Audit SPI terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan, Temuan Audit SPI, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan, Temuan Audit SPI terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel:
  - a. Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?
  - b. Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?
  - c. Temuan Audit SPI terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Manfaat yang ingin dicapai berdasarkan aspek teoritis dari pengembangan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademisi sehingga menjadi bahan referensi dalam ilmu pengetahuan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

### 1.5.2 Aspek Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain, sebagai berikut

#### 1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

#### 2. Bagi Masyarakat/Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat/pembaca yang berada di daerah Jawa Timur.

### 1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Perumusan sistematika penulisan merupakan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui maksud dilakukannya penelitian ini.

#### a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian mengenai ukuran pemerintah, dana perimbangan, temuan audit sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Isi bab ini meliputi: gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori yang digunakan dari umum sampai ke khusus mengenai ukuran pemerintah, dana perimbangan, temuan audit sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, disertai dengan penelitian terdahulu dan dilanjutkan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan keadaan objek yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independent (ukuran pemerintah, dana perimbangan, temuan audit sistem pengendalian internal) terhadap variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) yang dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan hasil penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian dan saran secara konkrit yang diberikan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam aspek teoritis dan aspek praktis